

# **PENGANTAR DIREKTUR**

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyusun sebuah rencana kerja setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 – 2019.

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017 merupakan acuan yang memuat gambaran program, kegiatan dan anggaran Direktorat selama satu tahun pada seluruh unit eselon III lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2017.

Akhir kata, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan pada tingkat wilayah maupun sektor yang sudah direncanakan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2017 dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan  
Kebijakan Wilayah dan Sektor

**Ir. Laksmi Wijayanti, MCP**  
NIP. 19690205 199503 2 001

# DAFTAR ISI

PENGANTAR DIREKTUR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Capaian Tahun 2015 Dan Tahun 2016 .....	3
II. KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2017 .....	6
III. KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017 .....	9
IV. PENUTUP .....	11
LAMPIRAN	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PDLKWS	.....	2
Tabel 2.	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2015	.....	4
Tabel 3.	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2016	.....	5
Tabel 4.	Indikator dan Target Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	.....	6
Tabel 5.	Kegiatan dan Kinerja Utama Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	.....	9

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 -2019 dan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- 2) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- 5) supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan
- 6) pelaksanaan administrasi Direktorat.

Sebagai salah satu unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki peran penting dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup nasional khususnya dalam bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Untuk menjalankan peran tersebut, maka dalam Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 – 2019, dirumuskan arah kebijakan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam 5 tahun kedepan serta strategi pencapaiannya dijabarkan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PDLKWS**

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Memperkuat kinerja direktorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penyempurnaan SOP kegiatan dan pelayanan;</li> <li>➢ Peningkatan kapasitas SDM;</li> <li>➢ Memenuhi standar minimal sarana dan prasarana perkantoran;</li> <li>➢ Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendalaman pengetahuan lapangan.</li> </ul>
2. Memperkuat dan memperluas jejaring kerja baik di pusat, daerah maupun dengan lembaga non pemerintah baik lokal maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatkan koordinasi kegiatan dan sinkronisasi kebijakan antar instansi;</li> <li>➢ Melibatkan diri secara aktif dalam forum-forum lingkungan hidup baik di lingkungan pemerintahan maupun non pemerintahan;</li> <li>➢ Membangun kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka <i>transfer of knowledge</i> isu-isu lingkungan.</li> </ul>
3. Meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan sebagai langkah awal dalam menjaga, mempertahankan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menyusun dan menyempurnakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SKB lingkup Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor;</li> <li>➢ Meningkatkan bimbingan/asistensi teknis terkait perencanaan pengelolaan kajian strategis lingkungan hidup dan hal hal terkait lainnya;</li> <li>➢ Meningkatkan pelayanan publik melalui <i>review</i> dokumen.</li> </ul>
4. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian Pemerintah Daerah terkait konsep pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menyelenggarakan forum-forum nasional sebagai upaya menjaga keterlibatan para pihak dalam mendukung kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>➢ Melakukan sosialisasi dan asistensi penerapan NSPK;</li> <li>➢ Mengoptimalkan peran teknologi informasi berbasis internet sebagai media publikasi, sosialisasi dan pembelajaran.</li> </ul>

Guna mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai program planologi kehutanan dan tata lingkungan, maka sasaran dan indikator yang harus dicapai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor untuk menjaga daya dukung dan daya tampung dengan indikator seluruh pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor terlaksana.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017.
2. Memberikan gambaran dari seluruh kegiatan lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

## **C. Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016**

Dalam penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Tahun 2017, capaian-capaian pada tahun tahun sebelumnya sangat penting untuk diperhatikan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

### ***1. Capaian Tahun 2015***

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam periode pembangunan lima tahunan (2015-2019), hal ini bermakna bahwa tahun 2015 merupakan awal meletakkan kondisi pengungkit akselerasi pencapaian target pembangunan empat tahun berikutnya. Kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor diharapkan menjadi bagian yang memberikan peran penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan program planologi kehutanan dan tata lingkungan melalui penyiapan instrumen dan regulasi guna percepatan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

Capain kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2015**

Indikator Kinerja (Utama)	Tahun 2015	
	Target	Realisasi
1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	100 KLHS yang terjamin kualitasnya dan	2 KLHS kebijakan nasional didampingi (RTRW Nasional dan PTPIN)
	100 KLHS yang <i>tereview</i> kelayakannya	1 KLHS RTRW Provinsi dinilai (RTRW Prov. Kaltara) 100 KLHS untuk RPJMD diinisiasi sejalan Pilkada
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	1 RPPLH Nasional	1 RPPLH Nasional
	1 RPPLH Provinsi	4 RPPLH Provinsi (DKI, Jabar, Jatim, Jateng) 1 RPPLH Prov diinisiasi (Kalsel)
	6 Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung	
3. Tersusunnya Neraca SDA-LH Provinsi/kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau	1 Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau Provinsi pada ekoregion Jawa	1 Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau Provinsi Jawa Barat (internalisasi valuasi ekonomi)

## 2. **Capaian Tahun 2016**

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan lima tahunan (2015-2019), hal ini bermakna bahwa tahun 2016 merupakan kelanjutan dalam meletakkan kondisi pengungkit akselerasi pencapaian target pembangunan tiga tahun berikutnya, yaitu percepatan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

Capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 3. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tahun 2016**

Indikator Kinerja (Utama)	Tahun 2016	
	Target	Realisasi
1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	30 KLHS yang terjamin kualitasnya Berbasis DDDT	30 KLHS
	16 KLHS yang <i>tereview</i> kelayakannya	16 KLHS
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan pemerintah	1 RPPLH Nasional	1 Dokumen RPPLH Nasional
	7 RPPLH Provinsi	7 RPPLH Provinsi
	10 RPPLH Kab/Kota	
	2 Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung	2 DRAFT Penetapan
	9 Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000
3. Tersusunnya Neraca SDA-LH Provinsi/kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau	2 Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau Provinsi/Kab/Kota	2 Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau Provinsi/Kab/Kota

## II. KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2017

Salah satu sasaran prioritas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2017 mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan adalah meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor.

Adapun indikator dan target untuk tahun 2017 untuk kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Indikator dan Target Kegiatan Pencegahan dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Sasaran Kegiatan	Indikator	Lokus Prioritas	Target
Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zona pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	Nasional (Pusat) dan 6 wilayah pesisir (DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel}	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang tereview kelayakan dan terjamin kualitasnya
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RRJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Lokus Prioritas tersaji pada halaman selanjutnya	170 KLHS
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Lokus Prioritas tersaji pada halaman selanjutnya	187 KLHS
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional), 1 Dokumen reuiu 5 Tahunan)	Nasional (Pusat)	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Kalimantan dan Sumatera	8 RPPLH
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Kalimantan dan Sumatera	10 RPPLH
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Nasional	1 penetapan indikasi DD DT Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator	Lokus Prioritas	Target
	Jumlah satuan peta Ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jawa, Bali, Nusa Tenggara	12 satuan peta ekoregion Jawa dan 27 satuan peta ekoregion Bali, Nusa
Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Nasional (34 Provinsi}	Tersusunnya Neraca SDA-LH, Valuasi Ekonomi SDA-LH dan PDRB Hijau Nasional

Selain kegiatan di atas, dalam rangka upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan, selain kegiatan yang dilakukan pada level nasional (pusat), telah diidentifikasi lokus pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang targetnya tersebar berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, diantaranya sebagai berikut:

#### A. Review Kelayakan dan Penjaminan Kualitas KLHS berbasis DD DT

	Target Tahun 2017	Tambahan Target (sisa target 2015 dan 2016)
Provinsi	Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara	DKI Jakarta
Kab/Kota	(Sumatera Utara : Kota Medan, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kab. Asahan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar) (Sumatera Barat : Kab. Solok, Kota Bukit Tinggi, Kab. Pasaman Barat, Kota Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam) (Riau : Kab. Indragiri Hulu, Kab. Bengkalis, Kota Dumai) (Sumatera Selatan : Kab. Musirawas Utara, Kab. Ogan Komering Hulu, Kab. Ogan Ilir, Kab. Musi Rawas) (Bengkulu : Kab. Muko-Muko, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Selatan) (Lampung : Kab. Lampung Selatan, Kota Metro, Kab. Lampung Timur, Kab. Bandar Lampung, Kab. Lampung Tengah) (Kep. Bangka Belitung : Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat) (Kep. Riau : Kab. Bintan) (Jawa Barat : Kab. Pangandaran, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung) (Jawa Tengah : Kota Semarang, Kab. Kebumen, Kab. Boyolali, Kota Pekalongan, Kab. Kendal, Kota Magelang, Kab. Wonosobo) (DI Yogyakarta : Kab. Bantul, Kab. Sleman) (Jawa Timur : Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Mojokerto, Kab. Banyuwangi, Kab. Malang, Kab. Sidoarjo) (Banten : Kota Cilegon, Kab. Serang) (Bali : Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar) (NTB : Kab. Lombok Utara, Kab. Bima, Kota Mataram, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Tengah) (NTT : Kab. Malaka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai) (Kal Bar : Kab. Bengkayang, Kab. Sintang) (Kal Sel : Kab. Kota Baru, Kota Banjar Baru, Kota	(Sumatera Utara : Kab. Toba Samosir, Kab. Labuhan Batu, Kab. Samosir, Kab. Simalungun) (Sumatera Barat : Kab. Pasamana, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam) (Riau : Kab. Kep. Meranti) (Sumatera Selatan : Kab. OKU Selatan, Kab. OKU Timur) (Bengkulu : Kab. Seluma, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong) (Lampung : Kab. Pesisir Barat, Kab. Way Kanan) (Kep. Riau : Kab. Lingga) (Jawa Barat : Kab. Indramayu, Kab. Karawang) (Jawa Tengah : Kab. Purbalinga, Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten) (Yogyakarta : Kab. Gunung Kidul) (Jawa Timur : Kota Blitar, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kab. Kediri, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kab. Pasuruan, Kab. Sumenep) (Bali : Kab. Karang Asem) (NTB : Kab. Dompus, Kab. Lombok Tengah) (NTT : Kab. Belu, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat) (Kal Bar : Kab. Sekadau, Kab. Melawi, Kab. Ketapang) (Kal Sel : Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tanah Bumbu) (Kalmtim : Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kota Samarinda) (Sul Tra : Kab. Minahasa Utara, Kab. Balmong Selatan, Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah, Kab. Bone Bolango, Kab. Pohuwato) (Sul Teng : Kab. Banggai Laut, Kab. Sigi) (Sul Sel : Kab. Maros, Kab. Kep. Selayar, Kab. Soppeng) (Sul Bar : Kab. Mamuju Utara) (Maluku Utara : Kab. Kepulauan Sula, Kab.

	<b>Target Tahun 2017</b>	<b>Tambahan Target (sisa target 2015 dan 2016)</b>
	Banjarmasin) (Kal Tim : Kab. Mahakam Ulu, Kab Paser) (Kal tara : Kab. Tana Tidung, Kab. Bulungan) (Sul Tra : Kab. Bolmong Timur, Kota Manda, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna) (Sul Teng : Morowali Utara, Kab. Poso, Kab. Toli-Toli, Kota Palu) (Sul Sel : Kab. Pangkajene Kep., Kab. Gowa, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara) (Gorontalo : Kab. Gorontalo) (Sul Bar : Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju) (Maluku : Kab. Seram bagian Barat, Kota Ternate, Kab. Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan) (Papua : Kab. Nabire) (Papua : Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni)	Halmahera Utar) (Papua : Kab. Asmat) (Papua Barat : Kab. Fakfak)

## B. Fasilitas Penyusunan Neraca SDA LH dan PDRB Hijau

Penyusunan SDA LH dan PDRB Hijau dilaksanakan terutama untuk menyediakan dan update data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (Neraca SDA LH dan PDRB Hijau) sebagai bahan penyusunan Neraca SDA dan PDB Hijau Nasional. Untuk tahun 2017, ditargetkan dokumen Neraca SDA dan PDRB Hijau Nasional sudah mulai tersusun yang didasarkan atas data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (Neraca SDA LH dan PDRB Hijau) daerah.

### **III. KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017**

Secara umum melalui Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor diharapkan dapat memastikan terjaminnya kualitas KLHS yang berbasis daya dukung dan daya tampung serta telaksananya *review* kelayakan KLHS; tersusunnya RPPLH yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan nasional maupun daerah (provinsi/kota/kabupaten); tersusunnya Neraca SDA-LH, Valuasi Ekonomi SDA-LH dan PDRB Hijau; Ditetapkannya indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Tersedianya peta ekoregion pada skala 1:250.000 serta terselenggaranya kegiatan perkantoran secara lancar dalam 1 tahun.

**Tabel 5. Kegiatan/Sasaran Kegiatan dan Kinerja Utama Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**

<b>Kegiatan / Sasaran Kegiatan</b>	<b>Kinerja Utama Tahun 2017 (atau s/d 2017)</b>
1. Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis lingkungan rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	➤ 1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang terreview kelayakan dan terjamin kualitasnya
2. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	➤ 170 KLHS* ➤ 187 KLHS*
3. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	➤ 1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional, 8 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 1 penetapan indikasi DDDT nasional, 12 satuan peta ekoregion Jawa dan 27 satuan peta ekoregion Bali, Nusra
4. Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional (tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	➤ Draft Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional/tematik
5. Terselenggaranya kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor yang efektif dan efisien	➤ 12 bulan layanan perkantoran

Pada tahun 2017 target kinerja utama kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor lebih kecil dari sasaran kegiatan sebagaimana telah disusun dalam rencana strategi tahun 2015-2019 yang disebabkan terbatasnya alokasi ketersediaan anggaran tahun 2017. Besarnya alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target kinerja utama tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.881.732.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

## **IV. PENUTUP**

Rencana kerja Tahun 2017 ini dipergunakan sebagai acuan utama oleh Subdirektorat (unit eselon III) lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan(RKA) Tahun 2017, dimana seluruh output kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2017 harus berdasarkan pada output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan dalam rencana kerja ini.

Harapannya adalah seluruh kegiatan yang direncanakan ketika dituangkan ke dalam DIPA Tahun 2017 akan lebih terarah pengalokasiannya dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional, secara spesifik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan program planologi kehutanan dan tata lingkungan melalui penyiapan instrumen dan regulasi guna percepatan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

Implementasi dari penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Rencana Anggaran Kegiatan(RKA)/ DIPA Tahun 2017 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017.

## **LAMPIRAN**

## KEGIATAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan
Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS rencana tata ruang laut nasional	Terjaminnya kelayakan dan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional	KLHS RTRLN yang terjamin kelayakan dan kualitasnya	1 KLHS RTRLN	001	Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KLHS RTRLN	
						002	Validasi kelayakan KLHS RTRLN	
		Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	Terjaminnya kelayakan dan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang terjamin kelayakan dan kualitasnya	6 KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	001	Bimbingan Teknis KLHS RZWP	
						002	Validasi kelayakan KLHS RZWP	
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Terjaminnya Kualitas KLHS berbasis DDDT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	Minimal 10 KHLS	001	Penyusunan NSPK KLHS	
						002	Bimbingan Teknis KLHS daerah	
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Tereviewnya kelayakan Dokumen KLHS	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	Minimal 15 KHLS	001	Validasi kelayakan KLHS Sektor	
						002	Validasi kelayakan KLHS Provinsi	
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional), 1 Dokumen reviu 5 Tahunan)	Penyusunan/Perbaikan/Review RPPLH Nasional	Tersusunnya/Reviewnya Dokumen RPPLH Nasional	Hasil Review Dokumen RPPLH Nasional	1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional	001	Penyusunan NSPK RPPLH Nasional	
						002	Midterm Review RPPLH Nasional	
						003	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis	

	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang tersusun sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	Minimal 5 RPPLH Provinsi	001	Penyusunan NSPK RPPLH Provinsi	
						002	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi	
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kab/kota	Terselenggaranya Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	RPPLH Kab/Kota yang tersusun sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	Minimal 10 RPPLH Kab/Kota	001	Penyusunan NSPK RPPLH Kab/Kota	
						002	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kab/Kota	
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Tersusunnya indeks daya dukung dan daya tampung LH Nasional	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 penetapan indikasi DD DT Nasional	001	Penetapan indikasi DDDT lingkungan hidup nasional	
						002	Pengembangan NSPK dan metode DDDT Lingkungan Hidup	
						003	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis DDDTLH daerah	
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250000	Tersedianya peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	12 Satuan Peta ekoregion jawa dan 27 satuan peta ekoregion Bali, Nusra	001	Pemetaan Ekoregion	
						002	Sosialisasi dan Asistensi Penerapan Ekoregion	
	Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup )	Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan neraca SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Tersusunnya Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Draft Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional/Tematik ( Data dan Informasi SDA LH dan PDRB Hijau)	001	Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA LH Tematik
002							Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB yang disesuaikan	
003							Fasilitasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan	
004							Pengembangan NSPK dan metoda Instrumen ekonomi lingkungan	

Good governance kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Nilai saki minimal 75	001	Layanan perkantoran	
		002	Pengadaan/pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
		003	Penyusunan Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
		004	Koordinasi kegiatan bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
		005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	

